



PEDOMAN INTERNAL PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2026



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
Jalan Semila Jati II, Desa Gubug, Kabupaten Tabanan
Telp (0361) 811171
2026**

KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur dapat menyusun Pedoman Internal Pengukuran Kinerja Tahun 2026 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pedoman Pengukuran Kinerja ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mengukur kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil. Pedoman pengukuran kinerja ini memberikan informasi pedoman pengukuran kinerja BPBD dalam pembangunan daerah.

Rampungnya pedoman ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga indikator kinerja yang tertuang pada RPJMD dan Renja BPBD dapat terukur dan akuntabel.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan untuk dapat melaksanakan amanah Misi kelima RPJMD dan tujuan organisasi.



Tabanan, 5 Januari 2026

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

Nyoman Srinadha Giri, S.E, M.M
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Dasar Hukum 2

 1.3 Tujuan 3

 1.4 Ruang Lingkup 3

BAB II PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA..... 4

 2.1 Sinergisitas RPJMD dan Renstra PD..... 4

 2.2 Indikator Kinerja..... 5

 2.3 Formulasi Pengukuran Kinerja 7

 2.4 Target Triwulanan Pengukuran Kinerja 7

BAB III PENUTUP 12

 3.1 Kesimpulan 12

 3.2 Saran 12

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 dan akan diwujudkan dalam 8 (delapan) misi yang dikenal dengan Asta Cita. Dari Asta Cita tersebut yang paling relevan dengan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan adalah Asta Cita yang kedua yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Asta Cita kedua diatas relevan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan dalam Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”

Pemerintah pusat telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2040, dimana dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui tiga strategi yaitu : 1). Rencana aksi dalam bentuk mitigasi bencana, 2).Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dalam bentuk rencana kontigensi, dan 3). Rencana pemulihan prabencana dalam bentuk rencana rekuntruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Prioritas pembangunan Provinsi Bali telah sinergis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan, sehingga dalam kebencanaan sesuai prioritas ketiga yakni jaminan sosial dan ketenagakerjaan maka pemerintah daerah terus berinovatif dalam mewujudkan daerah aman dan nyaman sehingga perekonomian dan inventasi dapat berkembang.

Perencanaan kebencanaan di Kabupaten Tabanan telah disusun sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 yang disenergiskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana. Dokumen perencanaan kinerja tersebut telah mengamanahkan untuk Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Kabupaten Tabanan adalah satu dari sembilan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali dengan wilayah terluas kedua setelah Kabupaten Buleleng dengan topografi yang *nyegara gunung* atau mulai dari laut sampai dengan pegunungan. Kondisi yang demikian itu menyebabkan berpotensi terkena ancaman bencana. Pada umumnya resiko bencana yang terjadi di Kabupaten Tabanan meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami), bencana akibat hydrometeorologi (banjir,

tanah longsor, angin puting beliung), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman, ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat sengketa tapal batas, konflik adat, dan konflik akibat sistem politik.

Mengingat Kabupaten Tabanan rawan akan bencana, maka pemerintah Kabupaten Tabanan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dengan melaksanakan tugas utama dalam penanggulangan bencana dengan menganut prinsip-prinsip: menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, hidup harmoni dengan bencana (*living in harmony with disaster*) dan memperhatikan *local wisdom* serta potensi-potensi yang tersedia. Potensi yang tersedia merupakan sarana yang harus didayagunakan untuk mengurangi dampak ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan guna dikonversikan dan diformulasikan menjadi peluang, dan menjamin pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Penyusunan pedoman pengukuran kinerja dalam penanggulangan bencana harus didasari atas isu-isu strategis yang terus berkembang, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang dituangkan dalam rencana staretgis perangkat daerah. Oleh karena itu maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkala melakukan pemutahiran pedoman pengukuran kinerja penanggulangan bencana.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan pedoman pengukuran kinerja internal penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanguangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- c. Undang-Undag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah .

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.
- f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3).
- g. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025 Nomor 29).

1.3. Tujuan.

Tujuan dari penyusunan dokumen pedoman pengukuran kinerja ini adalah memberikan informasi :

- a. Pedoman pengukuran indikator kinerja internal pada BPBD.
- b. Formulasi dan definisi operasional pengukuran indikator kinerja
- c. Target triwulanan kinerja tahun 2026

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyajian dokumen pengukuran kinerja internal ini meliputi pengukuran kinerja RPJMD yang menjadi amanah urusan wajib dasar sub urusan bencana, pengukuran kinerja Renja BPBD Tahun 2026 yang meliputi : indikator kinerja tujuan, indikator kinerja utama, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja sub kegiatan, dan indikator kinerja inovasi BPBD.

II. PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA

2.1 Sinergisitas RPJMD dengan Renstra PD

Perangkat Daerah diwajibkan merancang pedoman pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja, sehingga realisasi kinerja dapat diukur secara berkala dan dilakukan evaluasi dan analisis untuk diambil kebijakan strategis.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai amanah RPJMD Semesta Berencana melaksanakan amanah urusan wajib dasar. Perencanaan pembangunan urusan wajib dasar harus mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan daerah serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan amanah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perangkat Daerah wajib mendukung dan menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran strategis dalam rencana startegisnya. Adapun sinkronisasi RPJMD dengan Renstra BPBD disajikan seperti berikut ini.

Tabel Visi, Misi RPJMD dan Tujuan dan Sasaran Reenstra

RPJMD			RENSTRA	
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
5. Setia pada amanat penderitaan rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi dan berkeadaban	5.1. Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas transparan, akuntabel, efektif dan efisien melalui peningkatan Kompetensi ASN	5.1.4 Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD
	5.2 Terwujudnya Stabilitas Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat, Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	5.2.2Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	2. Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	2.1 Meningkatnya ketahan daerah terhadap bencana 2.2 Meningkatnya kualitas layanan SPM bencana

Sumber : Renstra BPBD, 2025-2029

2.2 Indikator Kinerja RPJMD

a. Indikator SPM

Badan Penanggulangan Bencana Daerah diamanahkan melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Bidang urusan yang dilaksanakan adalah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sehingga dalam mendukung pencapaian indikator RPJMD Semesta

Berencana di tujuan 1 yakni terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan dengan sasaran terwujudnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga. Indikator yang diukur yaitu rata-rata persentase capaian SPM 6 pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Bagian Tata Pemerintahan Setda Tabanan mengkoordinasikan perangkat daerah BPBD, dan Satpol PP dalam pemenuhan kriteria kinerja Trantibumlinmas yang diinput dalam aplikasi Kementerian Dalam Negeri : spm.bangda.kemendagri.go.id dan nilainya dikeluarkan oleh Ditjen Pembangunan Daerah.

Misi	Urusan	Indikator SPM	Awal RPJMD	Target						Sat
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Wajib dasar	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial)	100	100	100	100	100	100	100	%

b. Indikator Kinerja Daerah

Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang di harapkan tercapai pada akhir periode RPJMD yang dituangkan pada Bab IV tabel 4.3 indikator 11 yang sudah dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya seperti berikut ini.

Tabel Indikator Kinerja Daerah

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan dalam Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani									
Misi 5 : Setia pada amanat penderitaan rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hokum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi dan berkeadaban									
Aspek	Indikator	Awal RPJMD	Target Capaian						Sat
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I. Geografi dan Demografi	11. indeks risiko bencana	122,13	119,68	117,28	114,93	112,63	110,38	108,17	Angka

Sumber : RPJMD SB Tahun 2025-2029

c. Indikator Kinerja Kunci

Dalam mencap Sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 pada pedoman umum poin 28 menyatakan indikator kinerja kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah. Adapun IKK yang diampu bidang urusan ketertiban dan ketertiban umum seperti berikut ini.

Tabel 4.3 IKK Bidang Urusan Trantibun

Bidang urusan	Indikator	Awal RPJMD	Target Capaian						Sat
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Trantibun limnas	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan (<i>respon time rate</i>)	100	100	100	100	100	100	100	%

Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan, berdasarkan indikator kinerja daerah yang diamanahkan dalam RPJMD Semesta Berencana kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan (IKK) yaitu :

- Aspek pelayanan umum
- Fokus pada layanan urusan wajib dasar
- Bidang urusan Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun target dan capaian yang sudah diraih disajikan seperti tabel berikut ini.

Misi	No urusan	Aspek/ Bidang urusan/ Indikator	Awal RPJMD	Target						Sat
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	5	Trantibunlimas								
	5.6	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan (<i>respon time rate</i>)	100	100	100	100	100	100	100	%

Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029

d. Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi tujuan akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada RPJMD Semesta Berencana sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Adapun indikator kinerja tujuan seperti berikut ini.

Tabel Indikator Kinerja Tujuan Renstra BPBD

Misi ke-	Tujuan Renstra	Indikator tujuan	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya	Menurunkan	122,13	118,68	117,28	114,93	112,63	110,38	108,17

	Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana							
2	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	B	BB	BB	BB	BB	BB	A

Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029

d. Indikator Kinerja Utama

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta RPJMD Kabupaten Tabanan. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memiliki dokumen IKU sesuai Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/..../01/2025 *tentang Indikator Kinerja Utama*. Adapun IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel IKU BPBD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD Tahun 2024	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi RPJMD
				Thn 2025	Thn 2026	Thn 2027	Thn 2028	Thn 2029	Thn 2030
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks ketahanan daerah (angka)	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69
	Meningkatnya kualitas layanan SPM sub urusan bencana	Capaian layanan SPM sub urusan bencana (%)	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai AKIP BPBD (angka)	BB 72,85	BB 73,85	BB 74,85	BB 75,85	BB 77,05	BB 79,01	A 80,01

Sumber : Renstra 2025-2029

e. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program diukur untuk memberikan informasi dukungan kinerja program dan pendanaanya. Adapun indikator kinerja seperti berikut ini.

Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Program

Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target	Penanggungjawab
1. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana 2. Meningkatnya capaian SPM sub urusan bencana	Penanggulangan bencana	Presentase layanan penanggulangan bencana yang diberikan	100%	Bidang I Bidang II Bidang III
Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	Sekretariat

f. Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan yang mendukung kedua program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah baik di pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik kebencanaan didukung oleh delapan kegiatan dengan formulasi seperti berikut ini.

Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Meningkatnya pengetahuan mitigasi bencana masyarakat di wilayah rawan bencana	Prosentase pelayanan informasi mitigasi bencana di daerah rawan bencana	100%
Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%
Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Meningkatnya layanan penanganan bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100%
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kaji cepat pasca bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 dokumen
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 dok
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan yang akuntabel	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%
Administrasi umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	100%

	umum perangkat daerah		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Meningkatnya ketersediaan BMD yang membantu peningkatan kinerja perangkatd aerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Meningkatnya pelayanan publik perangkat daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya BMD yang layak operasional mendukung pelayanan kebencanaan	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100%

g. Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Sub kegiatan yang mendukung delapan kegiatan prioritas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah baik di pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik kebencanaan didukung oleh delapan kegiatan dengan formulasi seperti berikut ini.

Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kiinerja
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkanya kualitas perenanaan kinerja BPBD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	3 dokumen
Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Meningkatnya ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja BPBD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya pelayanan gaji dan tunjangan meunjang kienrja pegawai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	34 Orang/ bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Meningkatnya kualitas laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan
Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menngkatnya penyediaan komponen instalai listrik untuk penerangan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
Penyediaan peralatan rumah tangga	Meningkatnya ketersediaan peralatan rumah tangga mendukung pelayanan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Penyediaan bahan logistik kantor	Meningkatnya ketersediaan logistik untuk operasional kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya ketersediaan barang cetakan dan foto copy dokumen mendukung layanan administrasi	tersedianya barang cetak dan penggandaan	2 Paket
Penyediaan Bahan/material	Meningkatnya ketersediaan bahan material mendukung operasional kinerja	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Meningkatnya sinkronisasi program prioritas pusat dan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Meningkatnya tata kelola arsip perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dok
Pengadaan Mebel	Meningkatnya ketersediaan meubelair kantor	Jumlah unit pengadaan mebel tersedia	1 unit
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Meningkatnya sarana kerja operasional mendukung pelayanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 unit
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Meningkatnya ketersediaan materai mendukung layanan administrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya ketersediaan listrik, air, dan telepon menunjang pelayanan publik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Meningkatnya kinerja aparatur non ASN dalam pelayanan administrasi dan publik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Meningkatnya dukungan sarana operasional dalam mobilitas kinerja pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Meningkatnya peralatan kerja yang layak operasional	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16 unit
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Meningkatnya upaya mitigasi bencana secara tatap muka dan media elektronik / medsos di daerah rawan bencana	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	60 Orang
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan	Meningkatnya ketangguhan desa di daerah rawan bencana	Jumlah kawasan yang mendapat pemahaman kebencanaan	1 Desa

kesiapsiagaan			
Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Meningkatnya warga negara di daerah rawan bencana yang memahami mitigasi bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	200 orang
Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan warga negara menghadapi bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 orang
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya respon time layanan tangga pbencana	Persentase erlaksananya tim respon cepat penanganan darurat bencana	100 %
Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korrban Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya kemampuan Tim Kebencanaan dalam evakuasi korban bencana	Jumlah korban yang berhasil diketemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	8 orang
Koordinasi penanganan pascabencana kabupaten/kota	Meningkatnya penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sector berdasarkan RP3K kabupaten / kota yag dilegalkan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sector berdasarkan RP3K kabupaten / kota yag dilegalkan	1 Dokumen
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan rencana aksi penerapan SPM sub urusan bencana sebagai acuan pelayanan SPM	Jumah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	1dokumen

2.3 Formulasi Pengukuran Kinerja

a. Formulasi Pengukuran Kinerja SPM

Sesuai amanah RPJMD Semesta Berencana, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban mencapai target kinerja di misi kelima untuk memberikan pelayan dasar bidang trantibun. Pengukuran indikator capaian SPM ditetapkan untuk memudahkan mengukur capaian kinerja dan menjadi dasar evaluasi dan analisis lebih lanjut. Adapun formulanya seperti berikut ini.

Tabel Formulasi Pengukuran Kinerja SPM

SPM	Indikator	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggungj awab
Bidang trantibun	Persentase capaian standar pelayanan minimal bidang trantibun	Jumlah realisasi pelayanan dasar dan mutu layanan trantibun dibagi target layanan trantibun dikali 100	100%	BPBD SatpolPP
Sub Urusan Bencana	Persentase capaian standar pelayanan	Jumlah realisasi pelayanan dasar dan mutu layanan	100%	Bidang I Bidang II

	minimal sub urusan bencana	kebencanaan dibagi target layanan kebencanaan dikali 100		Bidang III Sekretriati
--	-------------------------------	--	--	---------------------------

Sumber : RPJMD 2025-2029

b. Formulasi Pengukuran IKD

Pengukuran kinerja IKD yang tertuang pada RPJMD ditetapkan untuk memudahkan mengukur capaian kinerja dan menjadi dasar evaluasi dan analisis lebih lanjut. Adapun formula pengukuran kinerja seperti berikut ini.

Tabel Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Daerah

Urusan	Indikator	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggungj awab
Aspek pelayanan umum, urusan wajib dasar	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan	Jumlah layanan cepat kebencanaan dibagi jumlah permohonan layanan kebencanaan dikali 100	100%	Bidang I Bidang II Bidang III Sekretariat

c. Formulasi Pengukuran IKK

Pengukuran kinerja utama ditetapkan untuk memudahkan mengukur capaian kinerja dan menjadi dasar evaluasi dan analisis lebih lanjut. Adapun formula pengukuran kinerja seperti berikut ini.

Tabel Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Kunci

Bidang Urusan	Indikator	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggungj awab
Trantibunlin mas	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan (respon time rate)	Realisasi respon time 24 jam 7 hari kerja dalam memenuhi permohonan layanan penanganan bencana	100%	Bidang I Bidang II Bidang III

d. Formulasi Pengukuran IKU

Tabel Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Sasaran Staretgis	Indikator Kinerja	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggungj awab
Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks ketahan an daerah (angka)	Pemenuhan 71 indikator dan 284 pertanyaan penurunan risiko bencana yang dinilai BNPB	0,65	Bidang I Bidang II Bidang III
Meningkatnya kualitas layanan SPM sub bencana	Capaian layanan SPM sub urusan bencana (%)	Realisasi 3 jenis pelayanan dasar dan mutu layanan sub urusan bencana dibagi target layanan dikalikan 100%	100%	Bidang I Bidang II Bidang III
Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP BPBD (angka)	Penilaian dari Inspektorat Kabupaten Tabanan	73,85	Sekretariat

e. Formulasi Pengukuran Kinerja Program

Indikator kinerja program diukur untuk memberikan informasi dukungan kinerja program dan pendanaanya. Adapun formula pengukuran kinerja seperti berikut ini.

Tabel Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Program

Program	Indikator Kinerja	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggungjawab
Penanggulangan bencana	Presentase layanan penanggulangan bencana yang diberikan	Jumlah bencana yang tertangani dibagi jumlah permohonan penanganan bencana dikali 100 %	100%	Bidang I Bidang II Bidang III
Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	Jumlah realisasi administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD dibagi jumlah target administrasi perkantoran dikali 100	100%	Sekretariat

f. Formulasi Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kegiatan yang mendukung kedua program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah baik di pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik kebencanaan didukung oleh delapan kegiatan dengan formulasi seperti berikut ini.

Tabel Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula / dasar pengukuran	Target Kinerja
Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	Realisasi sosialisasi KIE secara tatap muka, daring, dan media sosial lainnya bagi masyarakat rawan bencana dibagi target di 10 kecamatan	100%
Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	Realisasi kesiapsiagaan terhadap bencana bagi masyarakat rawan bencana dibagi target di 10 kecamatan	100%
Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	Realisasi penanganan bencana dibagi permohonan masyarakat terdampak bencana dikalikan 100%	100%
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	Realisasi penyediaan dokumen penataan sistem dasar pascabencana mendukung kinerja pelayanan dasar untuk masyarakat pulih lebih cepat	100%
Perencanaan, Penganggaran dan	Jumlah Dokumen perencanaan,	Reaalisasi penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan	3 dok

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	evaluasi kinerja BPBD	
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	Realisasi keuangan kegiatan kebencanaan dibagi dengan target anggaran yang sudah ditetapkan dikalikan 100%	100%
Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	Realisasi sub kegiatan pelayanan umum perkantoran dibagi jumlah sub kegiatan mendukung kinerja pelayanan umum BPBD	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	Realisasi pengadaan jenis sarana prasarana perkantoran dibagi target pengadaan jenis BMD dikalikan 100%	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	Realisasi sub kegiatan pelayanan jasa perkantoran dibagi jumlah sub kegiatan mendukung kinerja pelayanan jasa perkantoran BPBD	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD yang menunjang urusan kantor	Realisasi jumlah pelayanan pemeliharaan BMD dibagi jumlah pelayanan mendukung kinerja pemeliharaan BMD	100%

g. Formulasi Pengukuran Kinerja Sub Kegiatan

Sub kegiatan yang mendukung delapan kegiatan prioritas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah baik di pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik kebencanaan didukung oleh delapan kegiatan dengan formulasi seperti berikut ini.

Tabel Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula / dasar pengukuran	Target Kiinerja
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	Realisasi penyediaan dokumen Renja, Renaksi, dan DPA BPBD	3 dokumen
Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi penyediaan dokumen laporan kinerja dan laporan evaluasi renja BPBD	2 dokumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BPBD	34 Orang/ bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Realisasi penyediaan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan BPBD	2 laporan

	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Realisasi penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor	1 paket
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Realisasi penyediaan peralatan rumah tangga kantor BPBD	1 Paket
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Realisasi penyediaan bahan logistik kantor Realisasi penyediaan BPBD	1 Paket
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan disediakan	Realisasi penyediaan barang cetak dan penggandaan menunjang pelayanan BPBD	2 Paket
Penyediaan Bahan/material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Realisasi penyediaan bahan material menunjang pelayanan BPBD	3 paket
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Realisasi rapat koordinasi / konsultasi program kebencanaan ke pusat	2 Laporan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Realisasi pengelolaan dokumen arsip dinamis yang akuntabel	4 dok
Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel tersedia	Realisasi penyediaan meubelair kantor	1 unit
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Realisasi penyediaan peralatan BMD mendukung pelayanan perkantoran	2 unit
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Realisasi penyediaan jasa surat menyurat mendukung pelayanan administrasi	12 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Realisasi penyediaan jasa listrik, air, telepon mendukung pelayanan public	3 laporan
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Realisasi penyediaan jasa tenaga kebersihan dan P3K paruh waktu	12 Laporan
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Realisasi penyediaan perijinan, samsat, dan pajak BMD mendukung tertib administrasi BMD	12 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Realisasi pemeliharaan BMD mendukung operasional pelayanan public	16 unit
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap	Realisasi sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat rawan bencana secara tatap muka mendukung desa siaga bencana	60 Orang

	muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya		
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang mendapat pemahaman kebencanaan	Realisasi pembentukan desa tangguh bencana yang didukung relawan desa dan forum FPRB desa	1 Desa
Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Realisasi masyarakat rawan bencana mendapatkan peningkatan pengetahuan kebencanaan	200 orang
Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	Realisasi warga negara mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana	100 orang
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase erlaksananya tim respon cepat penanganan darurat bencana	Jumlah penanganan bencana yang diberikan dibagi dengan jumlah usulan permohonan penanganan bencana dikalikan 100%	100 %
Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korrban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil diketemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	Realisasi korban bencana yang dapat dievaluasi oleh Tim BPBD dan dilayani sesuai SOP	8 orang
Koordinasi penanganan pascabencana kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sector berdasarkan RP3K kabupaten / kota yag dilegalkan	Realisasi survey jitupasna pada masyarakat terampak bencana dan dapat diusulkan bantuan social pascabencana	1 Dokumen
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Reaalisasi penyediaan dokumen penerapan SPM sub urusan bencana mendukung pemenuhan IP SPM yang dinilai Kemendagri	1 dokumen

3.3 Pengukuran Kinerja Inovasi BPBD

Komitmen merealisasikan agenda pemerintah daerah yang kelima yaitu memantapkan ketahanan sosial budaya dan energi dengan tujuan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Adapun indikator inovasi ini sebagai berikut :

Nama Inovasi : Keluarga Siaga untuk Bencana (KASUNA) Tabanan

Indikator khusus :

- Pedoman inovasi Kesuna Tabanan : 1 dokumen
- SOP Inovasi kesuna Tabanan : 1 dokumen
- Jumlah ibu-ibu PKK di desa rawan bencana yang terlatih mengeduksi mitigasi bencana : 200 orang

Indiaktor umum :

- Jumlah desa rawan bencana yang terbentuk keluarga siaga bencana mendukung penilaian ketagguhan desa (PKD) : 6 desa rawan bencana

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah menyusun pedoman internal pengukuran kinerja untuk menjabarkan indikator RPJMD Semesta Berencana dan Renstra BPBD. Adapun rumusan pedoman internal pengukuran kinerja yang menjadi kewenangan dan urusan BPBD yaitu :

- a. Pengukuran kinerja RPJMD SB urusan wajib dasar di sub urusan bencana berupa indikator SPM dan Indikator Kinerja Daerah
- b. Pengukuran kinerja Renstra PD kewenangan daerah berupa indikator kinerja tujuan, indikator kinerja utama, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja sub kegiatan, dan indikator kinerja inovasi BPBD

3.2 Saran dan Langkah Antisipatif

Pedoman pengukuran kinerja urusan wajib dasar dalam pelayanan administrasi dan pelayanan publik kebencanaan dalam prabencana, darurat bencana, dan pasca bencana akan dapat terlaksana dengan baik dan terukur apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan dukungan anggaran.

Langkah antisipatif yang diajukan untuk penguatan kapasitas daerah dalam menurunkan indeks risiko bencana dan meningkatkan indeks ketahanan daerah adalah kolaborasi semua *pentahelik* untuk membangun daerah tangguh bencana dengan meningkatkan pelayanan wajib dasar kepada masyarakat rawan bencana dan masyarakat terdampak bencana.



Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan
[Signature]
I Nyoman Srinadha Giri, S.E., M.M
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010